

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Merujuk pada analisa penulisan sebagaimana dijelaskan pada Bab IV, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017. diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara garis besar penyajian pada laporan keuangan KKP tahun 2017 telah memenuhi prinsip relevan, dalam arti disajikan secara lengkap, disusun tepat waktu sesuai jenjang waktu penyampaian yang ditentukan, memiliki umpan balik atau *Feedback* dan memiliki Informasi yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan dari setiap pos pos penyajian.
2. Jika merujuk pada analisa hasil temuan atas ihtisar hasil pemeriksaan BPK belum dapat kategorikan Andal, terbukti tingginya nilai temuan dibandingkan dengan tahun tahun lainnya, artinya selain masih terdapat kesalahan materiil juga transaksi yang terkandung dalam laporan keuangan belum dapat diverifikasi diuji secara keseluruhan.
3. Penyajian pos pos dalam laporan keuangan tahun 2017 secara keseluruhan dapat disimpulkan dapat dibandingkan yaitu baik perbandingan dengan periode tahun sebelumnya tentunya dibandingkan dengan entitas lain.
4. Penyajian laporan keuangan KKP dan 2017 dapat disimpulkan dipahami, yaitu bahwa penjelasan atau Informasi dapat dipahami sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman pengguna laporan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai bahan masukan dalam upaya penyusunan Laporan Keuangan yang berkualitas untuk mempertahankan/memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) antara lain:

1. Dalam menjamin bahwa laporan yang disajikan tetap memenuhi prinsip relevan, Biro Keuangan sebagai koordinator penyusun LK tingkat kementerian mengupayakan peningkatan kemampuan dan pemahaman akuntansi melalui Diklat/Bimtek secara berkesinambungan.
2. Dalam mewujudkan laporan keuangan yang andal perlu dilakukan koordinasi antara Biro Keuangan, Inspektorat Jenderal dan eselon I terkait dalam menganalisa permasalahan yang timbul dalam penyusunan laporan keuangan, melakukan percepatan tindak lanjut, serta menginisiasi penyusunan standar operasional prosedur atau peraturan lainnya terkait tatacara penyajian pengungkapan persediaan yang masih menjadi kendala dan menjadi temuan dalam pemeriksaan laporan keuangan lingkup KKP;
3. Biro Keuangan sebagai koordinator penyusun LK tingkat kementerian memberikan penyegaran melalui Sosialisasi/ Bimtek terkait implementasi regulasi/ peraturan yang terkait penyusunan laporan keuangan;
4. Dalam menjamin laporan keuangan dapat memberikan Informasi yang jelas sehingga Informasi dapat dipahami. Biro Keuangan selaku koordinator penyusun laporan keuangan melakukan pengembangan sistem Informasi/ menerbitkan sistem Informasi yang mendukung dalam penyusunan catatan atas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Sugiyono, (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Edisi I, Jakarta: Penerbit Alfabeta.

Dedi Ismatullah, (2010). *Akuntansi Pemerintah*, Edisi I, Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia.

Kasmir, (2016). *Analisa Laporan Keuangan*, Edisi I. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Perada.

Cris Kuntadi, (2017a). *Excelent Leadership*, Edisi I, Jakarta: Penerbit Buku Republika.

_____. (2017b). *Sikencur (Sistem Kendali Kecurangan) Menata Birokrasi Bebas Korupsi*, Edisi Revisi, Jakarta: Elex Media Computindo.

Ifat Fauziah, (2018). *Panduan Praktis SAP Standar Akuntansi Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010*, Edisi I, Jakarta: Penerbit PT Serambi Semesta Distribusi.

Mahmudi (2020). *Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.

JURNAL NASIONAL

Rina Cheni Lopian, (2015). Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Pemda dalam pengelolaan laporan keuangan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Minahasa Selatan: Universitas Sam Ratulangi Manado.

Hendrik Manossoh (2015) Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dalam mewujudkan good government governance pada Pemerintah Prov. Sulawesi Utara: Universitas Sam Ratulangi Manado.

Ihwan Kema (2013). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Pemkot. Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Puji Santoso (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda di Prov. Lampung. Universitas Lampung.

Billy Rivaldy Pangalila, Sifrid S. Pangemanan, Jessy D. L. Warongan (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Dispenda Kab.Minahasa Tenggara. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Enda Baisida Lauma, Jenny Morasa, Lintje Kalangi (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Tetap Pemda Kab.Bolaang Mongondow. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Umar Sako, dan Felmi D. Lantowa (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemkab. Gorontalo. Universitas Sam Ratulangi Manado.

JURNAL INTERNASIONAL

- Saman Mohammadi, Mohamahhadi Maher, Sahar Zare 2012. "Implementation of full accrual basis in governmental organizations (Case Study: Shiraz University of Technology, Iran)" *Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business* Copy Right © 2012 Institute of Interdisciplinary Business Research 287 June 2012 4.
- Margareta Legenkova 2016. "International Public Sector Accounting Standards Implementation in the Russian Federation" *International Journal of Economics and Financial Issues* ISSN: 2146-4138;
- Mohammad Rakibul Islam 2017. "Analysis of Preparation and Presentation of Governmental Financial Statements of Bangladesh: A Comparison with International Standards" *Barisal University Journal Of Busines Studies*, 4;
- Bassam A. Albassam 2019. "The Public Financial System in Saudi Arabia: The Need for Reform" *International Journal on Governmental Financial Management* – 19 (2);
- Nagalingam Nagendrakumar 2020. "Extending the Institutional Theory: Public Sector Accounting and Financial Reporting Perspectives, Sri Lanka" *The International Journal on Governmental Financial Management* 20, (1).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- 4) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standard Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat.
- 6) Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 5/K/I/XIII.2/10/2013 Petunjuk Teknis Penetapan Batas Materialitas.

INTERNET.

Reviu Laporan Keuangan (<https://www.kemenkeu.go.id/page/reviu-laporan-keuangan>) di akses pada tanggal 15 Agustus 2020.

Laporan Keuangan KKP Tahun 2017 (<https://kkp.go.id/artikel/5109-laporan-keuangan-kkp-tahun-2017>) diakses pada tanggal 8 Agustus 2020.

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah (http://criskuntadi.blogspot.com/2008/12/reviu_laporan_keuangan_pemerintah.html) diakses pada tanggal 8 Agustus 2020.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Lampiran I

RIWAYAT HIDUP

Nama Penulis : Dwi Purwanto

Tempat.dan.Tanggal Lahir : Brebes, 28 September 1979

Alamat Rumah.Nomor.HP : Jalan Raya Kluwut Timur Karangsari RT 01/01
Bulakamba Brebes Jawa Tengah, 081326107010

Email/Surel : damarsuryo.dp@gmail.com

Status peerkawinan : Menikah dengan 3 anak

Nama insstansi : Inspektorat Jenderal KKP

Alamat insstansi, telepon : Jalan Medan Merdeka Timur No.16 GMB III
Lt. 3 Gambir Jakarta Pusat DKI Jakarta.

Jabatan : Sub Koordinator Kelompok Keuangan

Pangkat.Golongan : Penata /III/c

Riwayat Pendidikan : SDN 2 Kluwut Bulakamba, Brebes lulus 1992
SMPN 2 Bulakamba, Brebes lulus 1995
SUPM YAMIPURA, Tegal lulus 1999
S1 Tek. Perkapalan UPN Veteran Jakarta 2011
Pascasarjana Politkenik STIA LAN Jakarta

Riwayat Pekerjaan : Trainner Long Liner Fishing JITCO 2000 - 2003
Nahkoda Kapal Latih SUPM Negeri Tegal 2004
PNS Inspektorat Jenderal KKP 2005 - sekarang

Lampiran II

Transkrip Wawancara dengan Koordinator Akuntansi Biro Keuangan Sekretariat Jenderal (Setjen KKP)

Penulis:

- Apakah Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam penyusunan laporan KKP dari Perspektif Pokja LK (auditor) telah memenuhi prinsip-prinsip Relevan (memiliki umpan balik, memiliki manfaat prediksi, lengkap Informasi akuntansi dan disampaikan tepat waktu)?
- Memenuhi prinsip-prinsip Andal (Jujur Informasi penyajiannya, dapat diverifikasi/diuji dan Informasi yang netral)?
- memenuhi prinsip dapat dibandingkan (dengan laporan keuangan periode sebelumnya/ pada periode perubahan terjadinya)?
- memenuhi prinsip Informatif/dapat dipahami oleh pengguna (manajemen maupun pemeriksa)?

Narasumber:

“Terima kasih Pak Dwi, jadi kita sudah menggunakan sistem akuntansi lengkap, jadi akuntansi ini mulai dari proses penyusunan laporan dari tingkat realisasi

anggaran itu ada, masuk pada 1). sistem Informasi terkait dengan bagaimana pendapatan itu dilakukan kemudian yang ke 2). bagaimana pengenaan atau perhitungan terhadap belanja, disini tidak hanya pada porsi realisasinya saja, tetapi ada estimasi untuk pendapatan dan pagu untuk belanjanya, jadi pada pelaksanaannya secara realisasi anggaran kita sudah lengkap kemudian berikutnya disini maaf saya tunjukkan lagi di sistem Informasi untuk Kementerian Keuangan menggunakan omspan yah, dari omspan itu kami olah untuk mendapatkan presisi dari pagu berasal dari aplikasi RKA KL yang telah dibuat oleh Ditjen Anggaran dan kami juga menggunakan penggabungan dalam proses analisisnya dengan membuat analisis terhadap ketepatan akun 6 digit pada pelaksanaan per masing-masing pendapatan maupun belanjanya, kemudian yang kedua terkait dengan Neraca, neraca juga sama, kita menggunakan pelaporan rekonsiliasi berjenjang mulai dari sistem Informasi yang berasal dari pencatatan SAS atau tentang implementasi Keuangannya atau UP dan TUP nya kita menggunakan SAS dari UP-TUP, kemudian untuk dari pembayaran kita menggunakan SAS juga untuk mencetak SPM untuk menghasilkan Sp2d nya. kemudian yang ketiga dari situ seluruh kuitansi akan dicatat dalam aplikasi persediaan dan terakhir di naikan menuju ke SIMAK BMN untuk direkonsiliasi kembali menuju ke aplikasi SAIBA, atau Sistem Akuntansi Berbasis Akrual.

Dari situ lah kita nanti akan dapatkan presisi keseluruhan laporan keuangan di tingkat satker kemudian dari tingkat satker untuk dilaporkan ke jenjang selanjutnya, dikirimlah menuju kedalam aplikasi e-rekon, dari aplikasi e-rekon kita

akan dapatkan seluruh data tersebut telah dikompilasi pada tingkat wilayah tingkat Eselon I maupun terakhir nanti di tingkat KKP, kemudian terhadap Laporan Operasional juga sama, LO ini juga nantinya akan membentuk beberapa hal tentang beban dan pendapatan disini berasal dari jurnal krosing yang tadi telah atau hasil kiriman dari aplikasi SAIBA kalau di Neraca akan menghasilkan 5 hal yaitu yang pertama Aset dimana didalam aset itu ada aset lancar, aset tetap kemudian kedua aset lainnya, kemudian kalau aset lancar jelas kita akan memikirkan bahwa ini adalah likuiditas KKP, kemudian untuk aset tetap akan berhubungan dengan apa yang dimiliki oleh KKP dalam koridor aset tetapnya berasal dari belanja 53 kalau kita hubungkan dengan realisasi anggarannya, kemudian yang terakhir aset lainnya adalah proses penghapusan itu dari ke-3, kemudian yang ke-4 adalah tentang kewajiban kita dan terakhir di ke-5 adalah ekuitas, dari pembiayaan tadi yg berasal dari realisasi anggaran dan neraca tadi akan menghasilkan apa yang dimaksud dengan operasional, di operassioanl kita akan mengikuti berapa penerimaan negara dan dan berapa beban negara atau cost yang akan kita terima atau akan kita pergunakan kemudian terakhir tentang modal, biasanya dirumus akuntanasi adalah $A=H+M$. A adalah aset H adalah Huang + Modal.

Di ekuitas, ekuitas tersebut juga sama adanya perubahan permodalan dari KKP salah satunya di tahun ini kita meningkat aset nya sampai dengan 26 trilyun. Karena apa? semua dari reklasifikasi aset dari revaluasi aset yah penilaian kembali atas nilai aset itu sendiri, dan terakhir untuk pengungkapan kita akan

melakukan krosing terhadap aplikasi SIRUP Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dari Rencana umum pengadaan kita akan dapatkan beberapa kontraktual shgga nanti Informasi terhadap realisasi nya berasal dari sumber dana nya akan lengkap dan telah relevan untuk sekarang ini secara keseluruhan untuk dikomunikasikan, kemudian di tahun 2021 ini kita akan menggunakan aplikasi SAKTI dari kementerian keuangan yang harapannya sudah bisa menggunakan secara keseluruhan satu Informasi berasal satu aplikasi dari kementerian keuangan ini, kemudian terakhir kami rencana juga akan merilis sebuah aplikasi bernama SIPEKA sistem Informasi pengelolaan keuangan, untuk apa? Untuk mengkompilasi secara keseluruhan sampai dengan aplikasi laporan keuangan itu tercetak dengan lengkap”.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Transkrip Wawancara dengan
Koordinator Keuangan dan Umum Sekretariat
SET DITJEN DJPSDKP

Penulis:

Apakah Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam penyusunan laporan KKP dari Perspektif Pokja LK (auditor) telah memenuhi prinsip-prinsip Relevan (memiliki umpan balik, memiliki manfaat prediksi, lengkap Informasi akuntansi dan disampaikan tepat waktu)?

Nara Sumber:

“Baik terima kasih, yang pertama untuk pertanyaan ini dengan kondisi kita yang WTP yang sudah dipriksa oleh tim BPK-RI kita dianggap telah memenuhi salah satu prinsip akuntansi yang tadi ditanyakan yaitu relevan. Relevan ini berarti kita ada semacam implementasi dari kriteria dan kondisi ini yang dinamis setiap tahunnya di KKP khususnya di Ditjen PSDKP contoh. Beberapa belanja yang mungkin waktu jamannya disclaimer tidak lagi diterapkan di kita, misalnya dulu kalau di psdkp itu untuk membeli BBM Kapal Pengawas menggunakan akun persediaan, begitu menggunakan akun 521811 yang harus dicatat dalam aplikasi persediaan, begitu di tracking untuk relevansinya sampai dengan kondisi terakhir diaplikasi persediaan, yang ada dilambung kapal tidak dapat diyakini jumlah presisinya akhirnya kami belanja semacam itu menggunakan akun habis pake

sesuai dengan kesepakatan dengan BPK RI itu salah satu contoh yang kami lakukan yaitu merelavankan antara aturan dan apa apa saja yg telah di periksa dan menjadi semacam material error pd pemeriksaan yg lalu”

Penulis:

Apakah Implementasi Standard Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan di Instansi anda memenuhi prinsip-prinsip Andal (Informasi penyajian jujur, dapat diverifikasi dan Informasi yang netral)?

Narasumber:

“Ditjen PSDKP selama ini menyusun laporan keuangan sesuai sistem akuntansi yg berlaku, baik antar kriteria peraturan maupun implmtasi di pencatatan yang masuk ke dalam sistem aplikasi baik aplikasi SAIBA Simak BMN maupun persediaan, ini salah satu keterukuran dengan temuan-temuan SPI, temuan-temuan dengan cara pencatatan di kami tidak terlalu material, kami juga telah mempraktekan itu dengan pengketatan misal kami sebelum rekon dg teman teman satker kita lakukan prarekon, prarekon ini yang mengkodisikan antara subunsur yg ada di sistem pelaporan tadi SAIBA Simak BMN dan persediaan melakukan internalisasi sehingga data-data yang akan nanti digabung di tingkat Eselon satu (E-1) itu bisa diukur keterandalanannya”

Penulis:

Apakah Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan di Instansi anda memenuhi prinsip dapat diperbandingkan (dengan laporan keuangan periode sebelum/ saat periode terjadinya perubahan)?

Narasumber:

“Yang jelas kami selalu flash back ke belakang, kejadian disclaimer di 2017 dan 2016 di KKP kami lihat apakah sumbangsih di masing- masing Eselon I (E-1) khususnya di Ditjen PSDKP. Waktu itu kami melihat adanya semacam celah terkait dengan pengaturan dan penjustifikasian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kapal Pengawas, kami segera melakukan diskusi dengan teman-teman kementerian lain dalam hal ini Perhubungan, Bakamla, TNI-AL dan Polisi Perairan yang menggunakan Kapal Pengawas, kami melakukan semacam studi banding tentang tata cara pembelanjaan BBM mereka, jadi yg terjadi di tahun sebelumnya kami akan selalu lakukan evaluasi apakah pembelanjaan tepat pencatatannya tepat”

Penulis:

Apakah Implementasi Standard Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan di Instansi anda memenuhi prinsip Informatif/dapat dipahami oleh pengguna (manajemen maupun pemeriksa)?

Narasumber:

“Jadi karena salah satu prinsip akuntansi itu dalam rangka untuk menyusun salah satu tools-nya adalah kita harus memegang prinsip full dissclouser, full dissclouser salah satu prinsip akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan suatu

entitas akuntansi dengan pengungkapan penuh kita akan mengInformasikan mengungkapkan kejadian- kejadian yang secara teknis bisa dibukukan dan mana yang tidak dapat dibukukan, mana yang masuk dalam aplikasi mana yang masuk dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK), kalau dari kriteria itu beberapa tahun ini untuk laporan keuangan Eselon 1 ini, di PSDKP kalau dari respon dari temen- temen UAPA di Biro Keuangan kita dalam pengungkapan atau penerapan salah satu prinsip akuntansi yang tadi yaitu full dissloser yang informatif, kami sudah dinyatakan cukup informatif dan full discloser, apa apa saja yang bisa kami ungkapkan itu untuk memperjelas angka angka yang ada di Laporan keuangan yang Kami Susun.”

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Transkrip Wawancara dengan
Koordinator Keuangan dan Umum Sekretariat
Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB)

Penulis:

Apakah Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam penyusunan laporan KKP dari Perspektif Pokja LK (auditor) telah memenuhi prinsip-prinsip Relevan (memiliki umpan balik, memiliki manfaat prediksi, lengkap Informasi akuntansi dan disampaikan tepat waktu)?

Narasumber:

“Kalau relevan sudah pasti, jaminannya itu kan di kontrol quality assurance-nya adalah Biro Keuangan, walaupun terjadi misalnya penyimpangan itu kaitannya sistem penganggaran, karena sebetulnya apa yang kita eksekusi itu akan menjadi apa dia, sebetulnya itu sdh dibuat pada sistem penganggaran, memang dalam satu dua kasus bisa saja terjadi salah, contoh misalnya yang dianggarkan sebagai pemeliharaan akunya sudah tertentu itu, ternyata kemudian dieksekusi menjadi barang modal, tapi itu tidak bisa dipake sebagai alasan artinya tidak memenuhi prinsip-prinsip akuntansi pemerintah, sebetulnya sudah tau semua itu, apakah itu artinya ketidak tahuan atau memang bydesain saya tentunya tidak bisa menjawab, tapi sebetulnya dalam artinya penyusun laporan keuangan itu mestinya kalau dianggarkan sebagai pemeliharaan maka eksekusinya sebagai biaya yang

menjadi beban, tapi dalam prakteknya satu dua masih terjadi dan itu bisa kita buktikan dari munculnya temuan oleh teman teman Inspektorat maupun BPK. Contoh berikutnya ada penganggaran untuk beban, misal beban persediaan tidak membentuk persediaan, kemudian dieksekusi menjadi persediaan atau sebaliknya yang seharusnya persediaan dieksekusi tidak menjadi persediaan, tapi kalau saya artinya tetap berprinsip bahwa prinsip-prinsip untuk penerapan SAP pada saat penyusunan laporan keuangan itu pasti dilakukan, itu soal relevansinya. cuma mungkin disini yang perlu saya klarifikasi, maksudnya relevan ini dalam tanda kurung memiliki umpan balik. Manfaat prediksi. Jadi sebetulnya kalau misalnya 521811, itu sudah tau kita waktu penganggaran nya itu bahwa itu akan diprediksikan akan membentuk persediaan, tapi kemudian oleh satker yang mengeksekusi bisa saja itu entah diperlakukan seperti apa waktu mengeksekusinya, sehingga pada saat rampung laporan keuangannya dia tidak cocok lagi, artinya pada saat itu memang harus dilakukan tindakan koreksi atau jurnal atau apapun namanya untuk menyesuaikan terhadap prinsip prinsip itu tadi, dan saya yakin khusus pada DJPB itu terpenuhi karena apa, satker itu sendiri sudah dibekali pengetahuan bagaimana penyusunan laporan keuangan berdasarkan anggaran yang dieksekusi, dan itu direviu secara berjenjang baik tingkat Eselon I nya maupun oleh Itjen dan kontrolnya oleh pembina fungsinya yaitu Biro Keuangan. Kesimpulannya Saya sependapat bahwa laporan keuangan pada DJPB ini maupun yang sebelum belumlah memenuhi prinsip prinsip relevan”

Penulis:

Apakah Implementasi Standard Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan di Instansi anda memenuhi prinsip-prinsip Andal (Informasi penyajian jujur, dapat diverifikasi dan Informasi yang netral)?

Narasumber:

“kata kunci andal ini parameter yang dipakai adalah Informasi yang dipakai jujur, saya kira kalau Informasinya disajikan secara jujur itu terpenuhi, karena dapat ditrasir karena bukan hanya dilakukan satu pihak saja dan dapat diverifikasi, artinya angka-angka yang kami sajikan berdasarkan bukti bukti dokumen pertanggungjawaban yang ada data dungkungnya. dan yang terkait dengan netral disini kalau Saya mengartikan adalah tidak ada interfensi, jadi sepanjang yang kami lakukan selama ini dalam penyusun laporan keuangan itu berdasarkan bukti-bukti yang sudah diverifikasi dan dikodifikasi sesuai dengan standar- standar penyajian yang ada, dan untuk itu yang kami alami selama ini tidak ada intervensi baik dari atasan maupun dari pihak luar.”

Penulis:

Apakah Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan di Instansi anda memenuhi prinsip dapat diperbandingkan (dengan laaporan keuangan periode sebelum/ saat periode terjadinya perubahan)?

Narasumber:

“Saya kira ini juga terpenuhi, karena bagaimana pun juga dalam menyusun laporan keuangan pada saldo awal itu adalah saldo awal audited, jadi pada saat

menyusun laporan keuangan tahun 2020 ini menggunakan saldo akhir tahun lalu yang audited, itu jaminanya bahwa laporan keuangan pada DJPB ini dapat dibandingkan. Yang kedua pada penjelasan post-post neraca itu selalu ada perbandingannya, itu kita perhatikan, Saya kira itu terpenuhi karena disebutkan angka tahun sebelumnya dan tahun ini serta dijelaskan mutasi tambah dan kurangnya”

Penulis:

Apakah Implementasi Standard Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan di Instansi anda memenuhi prinsip Informatif/dapat dipahami oleh pengguna (manajemen maupun pemeriksa)?

Narasumber:

“Saya kira begini prinsip laporan keuangan itu sebagai bahan untuk Informasi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan, tentunya kalau untuk menjawab pertanyaan keempat ini, tentunya dalam subjeknya kami mendesain laporan keuangan ini tentunya untuk menjadi Informasi tapi apakah Laporan Keuangan yang kami susun dapat menjadi bahan Informasi itu harus ditanyakan lebih lagi kepada penggunanya. Kami yakin di DJPB ini telah memenuhi prinsip-prinsip Informatif”

Transkrip Wawancara dengan
Koordinator Keuangan dan Umum Sekretariat Inspektorat
Jenderal (ITJEN KKP)

Penulis:

Apakah Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam penyusunan laporan KKP dari Perspektif Pokja LK (auditor) telah memenuhi prinsip-prinsip Relevan (memiliki umpan balik, memiliki manfaat prediksi, lengkap Informasi akuntansi dan disampaikan tepat waktu)?

Narasumber:

“Pada Inspektorat Jenderal tentunya sesuai dengan pedomannya PP SAP pada peraturan tersebut telah menjelaskan prinsip relevan dalam penyusunan LK, yang artinya bahwa belanja maupun beban yang terbentuk memiliki feedback, dan telah diisusun secara tepat waktu yang memuat Informasi dan semuanya dituangkan dalam CaLK, kemudian ada aturan turunannya mengenai PMK 222 bahwa penyusunan LK telah diatur tentang tata cara penyampaian LKKL yang harus melaksanakan secara online, jadi tentunya satker harus berpedoman pada peraturan peraturan tersebut, kemudian disana juga dijelaskan tentunya kaitannya dengan relevansi tadi bahwa di LK itu menjelaskan angka angka yang ada di laporan realisasi anggaranya (LRA), Neraca, Laporan Operasional dan laporan

Ekuitas. Jadi disana menjelaskan secara rinci full disclosur dari mana terbentuknya sampai jika misal ada belanja modal itu yang terbentuk apa saja”

Penulis:

Apakah Implementasi Standard Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan di Instansi anda memenuhi prinsip-prinsip Andal (Informasi penyajian jujur, dapat diverifikasi dan Informasi yang netral)?

Narasumber:

“andal itu angka-angka pada laporan keuangan benar adanya, dapat diverifikasi dan bersifat netral, kemudian angka tersebut tentunya disetiap semester atau tahunan dievui oleh tim reviunya untuk memastikan bahwa angka angka tersebut cocok antara lampiran dengan penjelasannya. baik dari sisi keuangan (SAIBA) maupun dari Simak BMN maupun persediaan”

Penulis:

Apakah Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan di Instansi anda memenuhi prinsip dapat diperbandingkan (dengan laporan keuangan periode sebelum/ saat periode terjadinya perubahan)?

Narasumber:

“Terkait dengan prinsip yang ketiga yaitu dapat dibandingkan, jadi angka-angka yang di Neraca, LO, LPE itu disandingkan dua periode yaitu yang semester dengan semester yang tahunan dengan tahunan, kemudian di kolom kanan neraca itu selalu terdapat naik turun atau mutasi tahun ini berapa dan yang lalu berapa”

Penulis:

Apakah Implementasi Standard Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan di Instansi anda memenuhi prinsip Informatif/dapat dipahami oleh pengguna (manajemen maupun pemeriksa)?

Narasumber:

“Untuk prinsip yang keempat yaitu prinsip Informatif yang namanya laporan tentunya tidak hanya operator yang paham akan laporan keuangan tersebut, karena laporan tersebut harus dipublikasikan, maka isi dari laporan keuangan tersebut harus dapat dipahami oleh orang lain (pengguna), para pimpinan juga dapat mengambil keputusan dari angka yang tertuang pada laporan keuangan tersebut, jadi artinya angka yang disampaikan harus utuh dan lengkap”

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Transkrip Wawancara dengan

Operator Simak-BMNSekretariat BRSDMKP

Penulis:

Apakah Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam penyusunan laporan KKP dari Perspektif Pokja LK (auditor) telah memenuhi prinsip-prinsip Relevan (memiliki umpan balik, memiliki manfaat prediksi, lengkap Informasi akuntansi dan disampaikan tepat waktu)?

Narasumber:

“kami menyusun sesuai dengan kriteria SAP yang telah disusun oleh pemerintah dan yang kami tuangkan kedalamnya tentu lengkap”

Penulis:

Apakah Implementasi Standard Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan di Instansi anda memenuhi prinsip-prinsip Andal (Informasi penyajian jujur, dapat diverifikasi dan Informasi yang netral)?

Narasumber:

“sudah memenuhi kaidah kaidah tersebut pada penyusunannya baik pada Laporan Keuangannya maupun Laporan BMN-nya”

Penulis:

Apakah Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan di Instansi anda memenuhi prinsip dapat diperbandingkan (dengan laporan keuangan periode sebelum/ saat periode terjadinya perubahan)?

Narasumber:

“Untuk LK dan BMN yang ada pada kami sudah kami bandingkan pada 2020 dengan tahun sebelumnya yaitu 2019, jika ada kenaikan maka dapat dibandingkan dengan yang tahun lalu”

Penulis:

Apakah Implementasi Standard Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan di Instansi anda memenuhi prinsip Informatif/dapat dipahami oleh pengguna (manajemen maupun pemeriksa)?

Narasumber:

“Dalam penyusunan LK kami telah disesuaikan dengan kaidah kaidah pada SAP dan Informasi kami usahakan sudah memuat apa saja yang diminta oleh biro keuangan dan itjen KKP dalam melakukan revidi kami juga telah melakukan perbaikan jika diminta perbaikan”

J A K A R T A

Transkrip Wawancara dengan
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
(DJPRL)

Penulis:

Apakah Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam penyusunan laporan KKP dari Perspektif Pokja LK (auditor) telah memenuhi prinsip-prinsip Relevan (memiliki umpan balik, memiliki manfaat prediksi, lengkap Informasi akuntansi dan disampaikan tepat waktu)?

Narasumber:

“Sebenarnya dalam penyusunan laporan keuangan telah ada aturannya, jadi kita dalam penyusunan LK telah berpedoman pada aturan tersebut dan itu ada kontrolnya juga, misal pada saat ini kita sudah melalui e-rekon jadi jika terdapat kesalahan dapat diketahui, selain itu juga terdapat pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal, dan setiap kesalahan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi kita dapat ketahui, namun dalam prakteknya dalam penyusunan LK terkadang bisa lost karena tidak dapat terpantau semua oleh kita, sehingga itu yang pada saat pemeriksaan BPK menjadi temuan, dan jika terdapat temuan oleh BPK maka kita harus melakukan perbaikan terhadap LK tersebut, dan itu jika sudah menjadi temuan maka akan mempengaruhi opini dalam laporan keuangan”

Penulis:

Apakah Implementasi Standard Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan di Instansi anda memenuhi prinsip-prinsip Andal (Informasi penyajian jujur, dapat diverifikasi dan Informasi yang netral)?

Narasumber:

“Pada penyusunan LK terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE, and yang terakhir dan utama adalah CaLK, otomatis pada Neraca, LO, LRA tidak dapat dijelaskan maka kita akan larikan pada CaLK, jadi Informasi itu akan terangkum semua pada CaLK.”

Penulis:

Apakah Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan di Instansi anda memenuhi prinsip dapat diperbandingkan (dengan laaporan keuangan periode sebelum/ saat periode terjadinya perubahan)?

Narasumber:

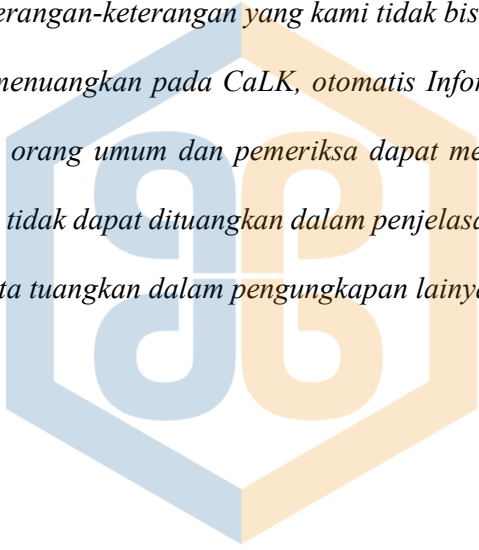
“Pada saat penyusunan LK selalu ada pembandingan, jika LRA semester 1 maka kita akan bandingkan juga dengan LRA semester 1 pada tahun lalu, jika neraca tahun ini kita akan bandingkan dengan neraca pada 31 Desember tahun lalu sebagai pembandingan dan pasti akan ketahuan perubahannya”

Penulis:

Apakah Implementasi Standard Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan di Instansi anda memenuhi prinsip Informatif/dapat dipahami oleh pengguna (manajemen maupun pemeriksa)?

Narasumber:

“Jadi jika ada keterangan-keterangan yang kami tidak bisa jelaskan pada laporan kita semua akan menuangkan pada CaLK, otomatis Informasi yang digali harus lebih dalam maka orang umum dan pemeriksa dapat mengetahui apa yang kita tulis, dan hal yang tidak dapat dituangkan dalam penjelasan Neraca, LRA, LO dan LPE maka akan kita tuangkan dalam pengungkapan lainnya dalam CaLK”



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Transkrip Wawancara dengan
Auditor/APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)
Inspektorat Jenderal KKP

Penulis:

Apakah Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam penyusunan laporan KKP dari Perspektif Pokja LK (auditor) telah memenuhi prinsip-prinsip Relevan (memiliki umpan balik, memiliki manfaat prediksi, lengkap Informasi akuntansi dan disampaikan tepat waktu)?

Narasumber:

“Tidak seluruhnya, untuk manfaat prediksi saya pikir belum dapat diperoleh dari SAP ini, karena Sebagian besar sistem ini hanya melihat masa lalu dan atau on going process”

Penulis:

Apakah Implementasi SAP dalam penyusunan laporan KKP dari Perspektif Pokja LK (auditor) memenuhi prinsip-prinsip Andal (Informasi penyajian jujur, dapat diverifikasi dan Informasi yang netral)?

Narasumber:

“Tidak seluruhnya, untuk Informasi yang jujur ini seringkali jadi dilemma. Di satu sisi Satker menginginkan mengungkapkan Informasi yang jujur secara lengkap, namun di sisi lain (Pemeriksa Eksternal) mengambil Informasi yang jujur dan full

disclosed ini untuk dijadikan temuan, sehingga Satker cenderung untuk menutupi beberapa Informasi yang berisiko jadi temuan”

Penulis:

Apakah Implementasi SAP dalam penyusunan laporan KKP dari Perspektif Pokja LK (auditor) memenuhi prinsip dapat diperbandingkan (dengan laporan keuangan periode sebelum/ saat periode terjadinya perubahan)?

Narasumber:

“Ya sudah memenuhi prinsip dapat dibandingkan”.

Penulis:

Apakah Implementasi SAP dalam penyusunan laporan KKP dari Perspektif Pokja LK (auditor) memenuhi prinsip Informatif/dapat dipahami oleh pengguna (manajemen maupun pemeriksa)?

Narasumber:

“Ya sudah memenuhi prinsip informatif, karena sudah dilengkapi dengan CaLK dan CaLBMN”

Lampiran III

Daftar Riwayat Hidup Key Informan
Biro Keuangan Sekretariat Jenderal (Setjen KKP)

DATA PRIBADI

N A M A

:**SUTRISNO SUBAGYO, S.E., M.AP**

:**197406222009011002**

:LAMONGAN/22-06-1974

:Laki-Laki

:ISLAM

:Kawin

:S2

://Ilmu Administrasi Negara

:**KOORDINATOR AKUNTANSI,
BIRO KEUANGAN,
SEKRETARIAT JENDERAL**

://

-/

:Penata Tk.I, III/d, 01-10-2018 / 01-01-
2009

:10 Tahun 5 Bulan

:12 Tahun 2 Bulan

:**ANALIS PENGELOLA
KEUANGAN APBN MADYA / 2020-
10-22**



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Daftar Riwayat Hidup Key Informan
Sekretariat Inspektorat Jenderal (Itjen KKP)

DATA PRIBADI

N A M A

MOCHAMAD FIRDAUS, S.E.,

M.A.B.

:197810072005021001

:JAKARTA/07-10-1978

:Laki-Laki

:ISLAM

:Kawin

:S2

://

**:KOORDINATOR KEUANGAN
DAN UMUM, SEKRETARIAT
INSPEKTORAT JENDERAL**

://

-/

Penata Tk.I, III/d, 01-10-2019 /

01-02-2005

:14 Tahun 1 Bulan

:16 Tahun 1 Bulan

:KEPALA BAGIAN

KEUANGAN DAN UMUM /

2019-12-20



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Daftar Riwayat Hidup Key Informan
SET DITJEN PSDKP

DATA PRIBADI

N A M A
NIP

:**ARIFIN SYAM, S.E. M.Si**
:**197503242002121008**

BULAKAMBA/24-03-1975

Laki-Laki

ISLAM

Kawin

S2

//

**KOORDINATOR KEUANGAN
DAN UMUM, SETDITJEN
PSDKP**

//

-/

Pembina, IV/a, 01-10-2017 / 01-
12-2002

18 Tahun 3 Bulan

18 Tahun 3 Bulan

**ANALIS PENGELOLA
KEUANGAN APBN MADYA /
2020-10-22**



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

Daftar Riwayat Hidup Key Informan
Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB)

DATA PRIBADI

N A M A

:**ERGUNA TARIGAN, S.E.**

NIP

:**196401021984031001**

:**KABANJAHE/02-01-1964**

:Laki-Laki

:KHATOLIK

:Kawin

:S1

://Manajemen

:**KOORDINATOR KEUANGAN
DAN UMUM, SEKRETARIAT
DITJEN PERIKANAN
BUDIDAYA**

://

-/

:Pembina Tk.I, IV/b, 01-10-2019 /
01-03-1984

:33 Tahun 5 Bulan

:37 Tahun 0 Bulan

:**ANALIS PENGELOLA
KEUANGAN APBN MADYA /
2020-10-22**

:AUDITOR



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Daftar Riwayat Hidup Key Informan

SETDITJEN PDSPKP

DATA PRIBADI

N A M A

:**BUDI PRASETYO, S.E.,M.P**

NIP

:**198002242005021002**

:**PURWOKERTO/24-02-1980**

:**Laki-Laki**

:**ISLAM**

:**Kawin**

:**S2**

:**//**

:**SUBKOORDINATOR
KEUANGAN,
KOORDINATOR KEUANGAN
DAN UMUM, SEKRETARIAT
DITJEN PDSPKP**

:**//**

:**-/**

:**Penata Muda Tk.I, III/b, 01-04-**

:**2017 / 01-02-2005**

:**14 Tahun 1 Bulan**

:**16 Tahun 1 Bulan**

:**ANALIS KEUANGAN / 2019-
06-01**



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Daftar Riwayat Hidup Key Informan

SETBAN BRSDMKP

DATA PRIBADI

N A M A

NIP

:YATIN AGUS RIYADI, S.Kom

:197908262002121002

:CILACAP/26-08-1979

:Laki-Laki

:ISLAM

:Kawin

:S1

://

**:SUBKOORDINATOR
PENGELOLAAN BARANG
MILIK NEGARA,
KOORDINATOR KEUANGAN
DAN UMUM, SEKRETARIAT
BRSDMKP**

://

-/

Penata Muda Tk.I, III/b, 01-04-

2018 / 01-12-2002

:16 Tahun 11 Bulan

:18 Tahun 3 Bulan

:ANALIS BMN / 2016-01-02



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Daftar Riwayat Hidup Key Informan

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL)

DATA PRIBADI

N A M A
NIP

:NASRULLAH, S.Kel

:198310142008011001

:JAKARTA/14-10-1983

:Laki-Laki

:ISLAM

:Belum Kawin

:S2

://Ilmu Kelautan

**:SUBKOORDINATOR
KEUANGAN,
KOORDINATOR KEUANGAN
DAN UMUM, SEKRETARIAT
DITJEN PENGELOLAAN
RUANG LAUT**

://

-/

Penata Tk.I, III/d, 01-04-2020 /
01-01-2008

:13 Tahun 2 Bulan

:13 Tahun 2 Bulan

:ANALIS KEUANGAN / 2016-
12-01



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Daftar Riwayat Hidup Key Informan
Auditor Inspektorat Jenderal KKP (APIP)

DATA PRIBADI

N A M A

**FREDY HARYANTO, S.Pi,
M.Ak**

NIP

:197501012002121005

:BREBES/01-01-1975

:Laki-Laki

:ISLAM

:Kawin

:S2

://Magister Akuntansi

**:KELOMPOK FUNGSIONAL,
INSPEKTORAT V,
INSPEKTORAT JENDERAL**

://

-/

**Pembina, IV/a, 01-04-2018 / 01-
12-2002**

:18 Tahun 3 Bulan

:18 Tahun 3 Bulan

**:AUDITOR MADYA / 2018-03-
01**

:AUDITOR



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

Lampiran IV

**DAFTAR OPERATOR PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN ESELON I
LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NO	UNIT.ESELON.I	OPERATOR SAIBA	OPERATOR SA-BMN
1	SEKRETARIAT JENDERAL	WISNU DANANG S, S.E	DICKY ASOKSAN R, S.E
		Penata Muda Tk.I, III/b	Penata Muda Tk.I, III/b
		S1 Akuntansi	S1 Akuntansi
2	INSPEKTORAT JENDERAL	TAUFIK HIDAYAT, S.AP	THOYIB W. AJI, S.St.Pi, M. Tr.A..P
		Penata Muda, III/a	Penata Tingkat I, III/d
		S1 Ekonomi Manajemen	S2
3	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	AHMAD GUNADI, S.Kom	GALIH IKA MUHAMMAD S.
		PRAMUBAKTI	PRAMUBAKTI
		S.1 Komputer	SLTA
4	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA	GINA RATNA SARI	JUNAEDI
		PenataMuda TkI, III/b	PengaturTingkat I, II.D
		S1	SLTA
5	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT	NASRULLAH, S.Kel	ABDUL HARIS, S.AP
		Penata Tingkat I, III/d	Penata, III/c
		S1 Ilmu Kelautan	S1 Administrasi Negara
6	DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUKSI KP	BUDI PRASETYO	YAYAT RAHMAT HIDAYAT
		Penata, III/b	Penata Muda, III/a
		S1 Akuntansi Manajemen	S1 Administrasi Negara
7	BADAN KARANTINA IKAN PENGAMANAN MUTU HASIL PERIKANAN	LINDA KRISTINA, S.E	AKHMAD NUR AZIZ, S.Kom
		Penata Tk.I, III/d	Penata, III/c
		S.1 Ekonomi Manajemen	S.1 Komputer
8	BADAN RISET PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN PERIKANAN	WISNU INDRABAYU, SE	YATIN AGUS RIYADI, S.Kom
		Penata, III/c	Penata Muda Tk.I, III/b
		S1 Ekonomi Manajemen	S1 Komputer
9	DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SD KP	TIKA UTARI, SE	RAHMI MIFTAHUL JANNAH
		Penata Muda, III/a	Pengatur, II/c
		S1 Manajemen Keuangan	D3

Lampiran V

Surat Pengantar Permohonan Ijin Penelitian



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

Jl. Administrasi II Pejompongan, Jakarta Pusat 10260
Telp. 5347085, 5328496, 5326396, Fax. 53651793, 5329996
Email : politeknik@stialan.ac.id, Website : www.stialan.ac.id

Nomor : 04/STIA.1.1/PPS.02.3
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa
Program Magister Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 06 Januari 2021

Yth.

- 1. Koordinator Akuntansi Biro Keuangan KKP**
 - 2. Kabag Keuangan Set Ditjen Lingkup KKP**
 - 3. Auditor/Apip Aparat Pengawas Internal Pemerintah KKP**
- Jl. Medan Merdeka Timur No. 8, Jakarta Pusat

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Dwi Purwanto
NPM : 1863002147
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Dalam
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan
Perikanan

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Wakil Direktur I Bidang Akademik,



Mala Sondang Silitonga

Tembusan :

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik;
3. Kajur Administrasi Publik;
4. Kaprodi Program Magister Terapan.

Lampiran VI

Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sutrisno Subagyo, SE., M.AP
Jabatan : Koordinator Akuntansi
Instansi : Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KKP
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa
Nama : Dwi Purwanto
NIM : 1863002147
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Sekolah Tinggi : POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Telah melakukan penelitian melalui wawancara dengan Koordinator Akuntansi Biro Keuangan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam rangka penelitian tesis dengan judul "Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan" pada tanggal 26 Januari 2021.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

J A K A R T A

Jakarta, 26 Januari 2021

Koordinator Akuntansi

Biro Keuangan SETJEN KKP.



Sutrisno Subagyo, SE., M.AP



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON : (021) 3519070 (LACAK) FAKSIMILE : (021) 3520346
WEBSITE : www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL : djpsdkp@kkp.go.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Arifin Syam, SE, M.Si
Jabatan : Koordinator Keuangan dan Umum
Instansi : Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa
Nama : Dwi Purwanto
NIM : 1863002147
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Sekolah Tinggi : POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Telah melakukan penelitian melalui wawancara dengan Koordinator Keuangan dan Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dalam rangka penelitian tesis dengan judul "Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan" pada tanggal 26 Januari 2021.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Januari 2021

Koordinator Keuangan dan Umum
Sekretariat Ditjen PSDKP



Arifin Syam, SE, M.Si



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 GEDUNG MINA BAHARI IV
LANTAI 5, 6, 7 DAN 8 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3519070 (LACAK) FAKSIMILE (021) 3513276 (021) 3513320
LAMAM : www.djpb.kkp.go.id

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Erguna Tarigan, SE
Jabatan : Koordinator Keuangan dan Umum
Instansi : Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:
Nama : Dwi Purwanto
NIM : 1863002147
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Sekolah Tinggi : POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Telah melakukan penelitian melalui wawancara dengan Koordinator Keuangan dan Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam rangka penelitian tesis dengan judul "Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan" pada tanggal 26 Januari 2021.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Januari 2021

Koordinator Keuangan dan Umum
Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya.





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16 GEDUNG MINA BAHARI III LANTAI 14 JAKARTA 10110
KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 35100132 FAKSIMILE (021) 3500132, 3520844
Email : kespri.djpdspkp@kpp.go.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Indra Sartika, SE, MBA
Jabatan : Sub Koordinator Keuangan
Instansi : Direktorat Jenderal PDSPKP
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa
Nama : Dwi Purwanto
NIM : 1863002147
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Sekolah Tinggi : POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Telah melakukan penelitian melalui wawancara dengan Bapak Budi Prasetyo, SE.,M.P sebagai penyusun Laporan Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dalam rangka penelitian tesis dengan judul "Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan" pada tanggal 17 Februari 2021.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Februari 2021
Sub Koordinator Keuangan
Direktoran PDSPKP.



Indra Sartika, SE, MBA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sidiq Pranoto, S.Kel, M.Si
Jabatan : Sub Koordinator Keuangan
Instansi : Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa
Nama : Dwi Purwanto
NIM : 1863002147
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Sekolah Tinggi : POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Telah melakukan penelitian melalui wawancara dengan Bapak Nasrullah, S.Kel sebagai penyusun Laporan Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, dalam rangka penelitian tesis dengan judul "Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan" pada tanggal 17 Februari 2021.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Februari 2021

Sub Koordinator Keuangan

Ditjen. Pengelolaan Ruang Laut.



Sidiq Pranoto, S.Kel, M.Si



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16, GEDUNG MINA BAHARI III LANTAI 2, 3, 4
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3522310, FAKSIMILE (021) 3522310
LAMAR www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK ltjen@kkp.go.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mochamad Firdaus, SE., M.AB
Jabatan : Koordinator Keuangan Umum
Instansi : Inspektorat Jenderal
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa
Nama : Dwi Purwanto
NIM : 1863002147
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Sekolah Tinggi : POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Telah melakukan penelitian melalui wawancara dengan Bapak Mochamad Firdaus selaku Koordinator Keuangan dan Umum, dan Fredy Haryanto, S.Pi., M.Ak selaku Auditor pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam rangka penelitian tesis dengan judul "Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan" pada tanggal 01 Maret 2021.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 01 Maret 2021

Koordinator Keuangan Umum
INSPEKTORAT JENDERAL KKP.



Mochamad Firdaus, SE, M.AB



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070, FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Putut Erie Sudjito, SE.
Jabatan : Sub Koordinator Keuangan
Instansi : Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa
Nama : Dwi Purwanto
NIM : 1863002147
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Sekolah Tinggi : POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Telah melakukan penelitian melalui wawancara dengan Bapak Yatin Agus Riyadi, S.Kom sebagai penyusun Laporan Keuangan pada Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dalam rangka penelitian tesis dengan judul "Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan" pada tanggal 17 Februari 2021.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

J A K A R T A

Jakarta, 18 Februari 2021

Sub Koordinator Keuangan
Badan Riset SDM KP.



Putut Erie Sudjito, SE